**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG BERPENGARUH TERHADAP BESARNYA
PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2012-2019)**

Erniyawati Mustaqomah¹

Sri Hutami²

^{1,2} Dosen Politeknik Pratama Mulia Surakarta

Erniyawati-09@gmail.com

ABSTRACT

Local tax is contributing the highest revenue to Local Genuine Income (PAD). Government attempt to increase local tax collection to improve PAD, especially through tax post. Establishing the effectiveness and factors that influencing the revenue from tax post begin a material subject. The Objective of this research is to measure degree of effectiveness and understanding the influence of inflation rate and Gross Regional Domestic Product on local tax revenue in Sukoharjo District from the Official of local revenue and the statistic Bureau (BPS) in Sukoharjo District. The literature study is conducted to support data collection. Result of this research indicates that the effectiveness of local tax collection in Sukoharjo District in period 2012-2019 is entirely very effective. Tax revenue in Sukoharjo District are most influenced by Gross Regional Domestic Product (PDRB). Based from these result, it may be suggested that the local government of Sukoharjo District in determining local tax shall firstly socialize the importance of tax for the development such taxpayer will be aware of paying tax in exchange for their welfare.

Keyword: Local tax, Inflation rate, Local Tax, PDRB.

PENDAHULUAN

Praktek kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat istilah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum akhirnya berubah menjadi desentralisasi (Rira, 2019). Desentralisasi dalam suatu negara berarti pendelegasian tugas dan tanggungjawab yang dulunya dipegang oleh pemerintah pusat dialihkan kepada daerah. Desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi dan partisipasi warga dalam aktivitas pembangunan, yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, meningkatkan keadilan sosial dan kualitas hidup rakyat. Bentuk riil dari azas desentralisasi dapat dilihat dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah mulai diterapkan secara efektif pada bulan Januari 2001. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar setiap daerah mampu mengatur rumah tangga sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Dengan otonomi, daerah bisa mengatur berbagai kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian maupun hal lainnya dengan lebih leluasa.

Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, peranan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal agar bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui dua cara (Mukfatih dalam Putu Mahardika, 2003), yaitu pertama Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Upaya yang kedua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sukoharjo 2012-2018

Jenis Pendapatan		Jumlah	Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah		Rp4.037.483.577.172	-
1	Pendapaan pajak Daerah	Rp2.078.106.694.914	51%
2	Hasil Retribusi Daerah	Rp320.183.651.623	8%
3	Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp160.999.549.857	4%
4	Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp1.492.595.680.778	37%

Sumber: DPPAKD Kabupaten Sukoharjo, 2012-2018

Berdasarkan table 1 diatas, dapat dilihat bahwa sector pajak daerah merupakan sector utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Derah Kabupaten Sukoharjo. Penerimaan dari pajak daerah menyumbang kontribusi sebesar 51% terhadap PAD. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang nOmor 34 Tahun 2000 terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat mengubah dan mendefinisikan jenis pajak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber daya yang sah di setiap daerah masing-masing. Pajak merupakan iuran wajib dan tanpa imbalan langsung kepada pembayarnya. Hasil iuran ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan public bagi masyarakat. Hasil pungutan ini, disatu sisi bisa dapat meningkatkan pendapatan daerah, namun di sisi lain juga dapat menghambat perkembangan perekonomian daerah bila pemungutan pajak dilakukan terlalu berlebihan atau ditarik tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan tariff pajak yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2015) misi utama pelaksanaan otonomaerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sumber Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No. 17/2003, Pasal 1, ayat (15)). Sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesyai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

- (1) Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
 - (2) Hasil Retribusi daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (4) Sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah, lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis PAD dan Dana perimbangan. Pos lain pendapatan yang sah antara lain; dana otonomi khusus, dana penyesuaian, pendapatan hibah, pendapatan dana darurat

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti propinsi, kabupaten dan kota praja untuk pembiayaan rumah tangganya sendiri yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Munawir, 1997). Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J Davey (1998), terdiri dari 4 hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasi oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Jenis pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo

Daerah kota atau kabupaten berhak menentukan jenis pajak yang dipungut daerah/ Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel, tarif 10%.
2. Pajak restoran, tarif 10%.
3. Pajak hiburan, tarif 35%.
4. Pajak reklame, tarif 25%.
5. Pajak penerangan jalan, tarif 10%.
6. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan, tarif sebesar 25%.
7. Pajak Parkir, tarif 30%.
8. Pajak air tanah, tarif 20%.
9. Pajak sarang burung walet, tarif 10%.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, tarif 0,3%.
11. BPHTP, tarif 5%.

Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan besarnya target penerimaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nilai efektivitas digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja pemungut pajak daerah dalam melaksanakan proses pemungutan pajak daerah serta bisa digunakan untuk dijadikan dasar dalam menentukan berapa target penerimaan pajak daerah pada tahun berikutnya.

1. **Laju Inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah.**

Laju inflasi, laju inflasi adalah peristiwa kecenderungan naiknya harga-harga suatu barang secara umum, terjadi terus-menerus dan meluas atau berimbas pada meningkatnya pada harga barang-barang lainnya. Beberapa indeks harga yang sering digunakan dalam pengukuran inflasi adalah ; Indeks harga konsumen, Indeks harga perdagangan, GNP *deflator*.

2. Jumlah Penduduk, menurut Perencanaan Tenga Kerja Nasional (1996)

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per tiga orang. Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data kependudukan , yaitu hasil sensus, survei dan registrasi penduduk.

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno (2004) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Untuk mencari PDRB, yaitu dihitung dengan cara membagi antara pendapatan regional atas harga berlaku dan atas harga konstan, dan setelah itu dikalikan 100%.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Dengan hasil pemungutan pajak yang optimal, efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah akan memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang optimal.

H₁: Tingkat Pemungutan pajak daerah secara keseluruhan maupun masing- masing jenis Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif.

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus, yan gmeluas atau meningkatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain. Menurut Boediono (1982), kecenderungan naik itu

berlangsung terus menerus. Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak lepas dari masalah inflasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Apabila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

H₂: Laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Produk domestic regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui laju kenaikan PDB dan PDRB. Kenaikan PDRB diukur dengan cara mengurangi PDRB tahun ini dengan tahun sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001).

H₃: PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Seluruh data yang dipakai untuk mengembangkan penelitian ini merupakan data sekunder dan diambil dari data statistik serta data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2012 – 2019. Sumber data penelitian ini adalah (1) Data Publikasi Pusat Data Statistik Kabupaten Sukoharjo, (2) Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sumber-sumber lain yang relevan. Data-data tersebut dihimpun dan diperoleh melalui teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan teori dari buku-buku literature, publikasi tahunan serta hasil penelitian terdahulu.

Variabel Penelitian

1. Variabel dependen; variabel dependen menggunakan penerimaan pajak daerah yaitu angka yang didapat setelah dilakukan pemungutan pajak daerah terhadap wajib pajak selama satu tahun anggaran tertentu.
2. Variabel independen; variabel dependen dalam penelitian ini adalah (1) Inflasi yang didefinisikan sebagai kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (terus-menerus) yang diukur dalam satuan prosentase dan (2) PDRB yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di dalam satu wilayah atau daerah dalam 1(satu) tahun tertentu dengan berlaku atau konstan diukur dalam satuan. Seluruh variable yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu (Kristiana, 2014; Dian, 2016; Tahwin, 20013, dan Saputro, 2018).

Model Penelitian dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh bukti empiris efektivitas pungutan pajak daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis ratio, analisis ratio digunakan untuk mengetahui efektivitas pungutan pajak daerah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tingkat efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan besarnya target yang telah ditentukan. Pemungutan pajak dikatakan efektif apabila hasil perhitungan (nilai) rasionya lebih besar atau sama dengan satu (Devas, 1998). Tingkat efektivitas diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan pajak}} 100\%$$

Tingkat keberhasilan kerja ditentukan berdasarkan peringkat dengan menggunakan skala peringkat (Mahmudi, 2007). Skala peringkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian sama dengan 100% berarti efektif

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti cukup efektif
- b. Regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis data berupa software statistic SPSS 19 for windows. Untuk menguji mengenai seberapa besar pengaruh laju inflasi dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah, maka digunakan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Inf} + \beta_2 \text{Pdrb} + \mu_i \dots\dots(\text{Gujarati, 1995}).$$

- Y : Variabel Penerimaan Pajak daerah.
- Inf : Variabel Laju Inflasi
- Pdrb : Variabel Produk domestic Regional Bruto
- β_0 : Koefisien Intersep
- β_1 : Koefisien Inflasi
- μ_i : Variabel Pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Laju Inflasi, PDRB & Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Laju Inflasi	PDRB	Pendp Pajak Daerah
	(%)	(Rp)	(Rp)
2012	4,2	18.342.247,3	60.667.404,4
2013	8,4	19.401.889,4	752.557.175,6
2014	7,9	20.448.931,6	953.331.690,0
2015	2,7	21.612.078,2	1.124.974.121,4
2016	2,3	22.847.982,8	1.250.050.405,0
2017	3,4	24.163.940,0	1.403.172.311,9
2018	2,3	25.564.065,1	1.597.728.773,6
2019	2,4	27.076.442,6	1.682.236.018,9

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2012-2019

PDRB menjadi salah satu indicator perkembangan perekonomian suatu daerah. PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 – 2019 berdasarkan harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti perekonomian juga semakin meningkat pada masyarakat Sukoharjo. Sistem Pemungutan Pajak daerah di

Kabupaten Sukoharjo adalah *Self Assesment System* dimana memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah yang dibayarkan setiap tahunnya sesuai ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Mardiasmo, 2016). Wajib pajak dianggap mampu menghitung, memahami, mempunyai tingkat kejujuran tinggi serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

Tabel 3
Efektivitas Pungutan Pajak Hotel Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp331.700.000	Rp564.566.668	170%	Sangat Efektif
2013	Rp690.000.000	Rp989.699.497	143%	Sangat Efektif
2014	Rp1.350.000.000	Rp1.989.030.627	147%	Sangat Efektif
2015	Rp1.785.500.000	Rp2.973.165.452	167%	Sangat Efektif
2016	Rp4.300.000.000	Rp5.308.447.131	123%	Sangat Efektif
2017	Rp4.500.000.000	Rp6.397.533.653	142%	Sangat Efektif
2018	Rp5.000.000.000	Rp7.649.818.108	153%	Sangat Efektif
2019	Rp6.500.000.000	Rp5.089.851.290	78%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp24.457.200.000	Rp30.962.112.426	127%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah

Tabel 4
Efektivitas Pungutan Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp493.000.000	Rp595.469.078	121%	Sangat Efektif
2013	Rp1.000.000.000	Rp1.688.769.974	169%	Sangat Efektif
2014	Rp2.600.000.000	Rp4.389.540.732	169%	Sangat Efektif
2015	Rp5.000.000.000	Rp6.547.113.823	131%	Sangat Efektif
2016	Rp8.100.000.000	Rp9.613.015.603	119%	Sangat Efektif
2017	Rp8.500.000.000	Rp11.853.627.012	139%	Sangat Efektif
2018	Rp11.525.000.000	Rp16.062.122.510	139%	Sangat Efektif
2019	Rp14.100.000.000	Rp20.154.932.802	143%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp51.318.000.000	Rp70.904.591.534	138%	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah

Tabel 5
Efektivitas Pungutan Pajak Hiburan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp85.880.000	Rp112.409.700	131%	Sangat Efektif
2013	Rp160.000.000	Rp285.232.392	178%	Sangat Efektif
2014	Rp585.000.000	Rp1.311.486.135	224%	Sangat Efektif
2015	Rp2.104.450.000	Rp2.823.823.259	134%	Sangat Efektif
2016	Rp3.100.000.000	Rp3.562.332.168	115%	Sangat Efektif
2017	Rp3.200.000.000	Rp3.936.583.386	123%	Sangat Efektif
2018	Rp5.000.000.000	Rp6.522.815.744	130%	Sangat Efektif
2019	Rp5.500.000.000	Rp6.715.160.434	122%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp19.735.330.000	Rp25.269.843.218	128%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah,

Tabel 6
Efektivitas Pungutan Pajak Reklame Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp2.000.000.000	Rp2.589.471.200	129%	Sangat Efektif
2013	Rp3.175.000.000	Rp4.228.787.275	133%	Sangat Efektif
2014	Rp3.175.000.000	Rp3.693.997.000	116%	Sangat Efektif
2015	Rp3.175.000.000	Rp3.721.488.660	117%	Sangat Efektif
2016	Rp4.500.000.000	Rp4.839.583.793	108%	Sangat Efektif
2017	Rp3.200.000.000	Rp4.199.766.071	131%	Sangat Efektif
2018	Rp3.000.000.000	Rp4.616.641.287	154%	Sangat Efektif
2019	Rp3.000.000.000	Rp4.616.641.287	145%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp25.225.000.000	Rp32.506.376.573	129%	Sangat Efektif

Sumber data: data yang diolah

Tabel 7
Efektivitas Pungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp26.100.341.000	Rp29.776.437.824	114%	Sangat Efektif
2013	Rp34.855.750.000	Rp39.477.825.005	113%	Sangat Efektif
2014	Rp42.000.000.000	Rp51.848.923.253	123%	Sangat Efektif
2015	Rp45.000.000.000	Rp62.178.855.655	138%	Sangat Efektif
2016	Rp61.250.000.000	Rp63.601.337.296	104%	Sangat Efektif
2017	Rp61.500.000.000	Rp74.760.620.384	122%	Sangat Efektif
2018	Rp65.000.000.000	Rp81.578.369.742	126%	Sangat Efektif
2019	Rp70.000.000.000	Rp86.326.409.021	123%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp405.706.091.000	Rp489.548.778.180	121%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah

Tabel 8
Efektivitas Pungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kab. Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp300.000.000	Rp447.471.500	149%	Sangat Efektif
2013	Rp450.000.000	Rp564.998.000	126%	Sangat Efektif
2014	Rp450.000.000	Rp654.826.500	146%	Sangat Efektif
2015	Rp450.000.000	Rp586.882.000	130%	Sangat Efektif
2016	Rp450.000.000	Rp565.095.160	126%	Sangat Efektif
2017	Rp450.000.000	Rp646.715.320	144%	Sangat Efektif
2018	Rp525.000.000	Rp1.172.855.860	223%	Sangat Efektif
2019	Rp652.000.000	Rp1.047.483.125	161%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp3.727.000.000	Rp5.686.327.465	153%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah

Tabel 9
Efektivitas Pungutan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp51.120.000	Rp65.209.000	128%	Sangat Efektif
2013	Rp130.000.000	Rp165.764.000	128%	Sangat Efektif
2014	Rp230.000.000	Rp343.435.100	149%	Sangat Efektif
2015	Rp350.000.000	Rp630.557.201	180%	Sangat Efektif
2016	Rp500.000.000	Rp597.459.225	119%	Sangat Efektif
2017	Rp550.000.000	Rp929.344.765	169%	Sangat Efektif
2018	Rp1.250.000.000	Rp1.780.796.992	142%	Sangat Efektif
2019	Rp1.600.000.000	Rp2.202.594.959	138%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp4.661.120.000	Rp6.715.161.242	144%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah

Tabel 10
Efektivitas Pungutan Pajak Air Bawah Tanah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp1.225.000.000	Rp1.452.637.950	119%	Sangat Efektif
2013	Rp1.350.000.000	Rp1.467.347.950	109%	Sangat Efektif
2014	Rp1.350.000.000	Rp1.582.645.450	117%	Sangat Efektif
2015	Rp1.350.000.000	Rp1.354.726.682	100%	Sangat Efektif
2016	Rp1.300.000.000	Rp1.437.342.177	83%	Sangat Efektif
2017	Rp1.200.000.000	Rp1.488.815.771	124%	Sangat Efektif
2018	Rp3.000.000.000	Rp4.383.982.809	146%	Sangat Efektif
2019	Rp3.250.000.000	Rp4.244.100.783	131%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp14.025.000.000	Rp17.411.599.572	124%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah

Tabel 11
Efektivitas Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Sukoharjo Tahun 2012-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kesimpulan
2012	Rp25.000.000.000	Rp25.063.731.460	100%	Sangat Efektif
2013	Rp25.000.000.000	Rp26.387.293.463	106%	Sangat Efektif
2014	Rp26.000.000.000	Rp29.519.284.204	114%	Sangat Efektif
2015	Rp26.000.000.000	Rp31.680.799.406	122%	Sangat Efektif
2016	Rp27.000.000.000	Rp35.480.427.946	131%	Sangat Efektif
2017	Rp30.000.000.000	Rp36.104.224.831	120%	Sangat Efektif
2018	Rp30.000.000.000	Rp36.005.474.311	120%	Sangat Efektif
2019	Rp30.000.000.000	Rp36.659.981.705	122%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp219.000.000.000	Rp256.901.217.326	117%	Sangat Efektif

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan table rasio efektivitas terhadap pungutan berbagai jenis pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo di atas, dapat diketahui hasilnya adalah sangat efektif sehingga H_1 diterima. Secara rata-rata, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo sangat baik, dalam arti pemerintah telah berhasil dalam melakukan pemungutan pajak. Koefisien efektivitas untuk masing-masing pajak daerah tersebut diatas 100%. Jika dianalisis lebih lanjut, rata-rata efektivitas tertinggi ke rendah adalah pajak bahan galian golongan C (153%), Pajak parkir (144%), Pajak restoran (138%), Pajak Reklame (129%), Pajak Hiburan (128%), Pajak Hotel (127%),

Pajak Air bawah tanah (124%), serta PBB (117%). Dengan demikian dapat diartikan bahwa keseluruhan pemungutan Pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo dapat mampu mencapai target penerimaan pajak daerah pada 8 tahun terakhir.

Statistik Deskriptif

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam variable yang digunakan berdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dilakukan uji Shapiro-Wilk.

Tabel 13
Normalitas dengan Shapiro-Wilk
Test of Normality

	Kolmogorov-Smimov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.252	8	.145	.937	8	.586

a. Liliefors Significance Correction

Output SPSS tersebut memperlihatkan nilai signifikan Shapiro-Wilk sebesar 0.586 Oleh karena nilai prob. Sig. = 0,586 > 0,05 maka disimpulkan residu berdistribusi Normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 14
Hasil uji Multikoinearitas
Coefficients²

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-3,208E9	8.741EB		-3.670	.014		
Laju Inflasi	4.343E9	4.018E9	.210	1.081	.329	.566	1.768
PDRB	184.042	33.451	1.070	5.502	.003	.566	1.768

a. Dependent Variable : Pendapatan Pajak Daerah

Nilai VIF untuk variabel PDRB adalah 1,768 dengan Tolerance-nya 0,566 dan nilai VIF untuk Laju Inflasi adalah 1,768 dengan Tolerance-nya 0,566. Karena nilai VIF dari kedua variabel lebih kecil dari 10 atau 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.

Uji Autokorelasi

Tabel 15
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.945 ^a	.893	.850	2.02937E8	.963

- a. Predictors : (Constant),PDRB, Laju Inflasi
- b. Dependent Variable : Pendapatan Pajak Daerah

Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai $d_L=0,5591$ dan nilai $d_U=1,771$ dengan $k = 2$ dan $n = 8$. Nilai Durbin-Watson hitung sebesar 0,963 lebih besar dari 0,5591 dan lebih kecil dari 2,229 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil keseluruhan dari uji normalitas data diatas, model regresi dengan variable independen inflasi dan produk domestic regional bruto dapat disimpulkan bahwa model tersebut layak digunakan dalam penelitian karena memenuhi azas normalitas data dan bebas dari masalah asumsi klasik.

b. Hasil Analisis Regresi Linier berganda

Tabel 13
Hasil analisis regresi linier berganda
Coefficient²

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	-	8.741E8		-	.014		
Laju Inflasi	3.208E9	4.018E9	.210	3.670	.329	.566	1.768
PDRB	4.343E9	33.451	1.070	1.081	.003	.566	1.768
	184.042			5.502			

- a. Dependent Variable : Pendapatan Pajak Daerah

Dari hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,3208E9 + 4,343E9infla_1 + 184,042 PDRB_2 + e$$

Keterangan

Y : Pendapatan Pajak Daerah

inflasi₁ : Laju Inflasi

PDRB₂ : PDRB

Tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk variable Laju inflasi, nilai signifikansi sebesar 0,329. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Nilai signifikansi variable PDRB sebesar 0,03 > 0,05, yang artinya PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Koefisien regresi PDRB bernilai positif artinya pada saat PDRB naik maka Pendapatan Pajak Daerah juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat PDRB turun maka Pendapatan Pajak Daerah juga turun. Kenaikan PDRB sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah 184,042 satuan dan sebaliknya, penurunan PDRB sebesar 1 satuan akan menurunkan Pendapatan Pajak Daerah 184,042 satuan. Dengan demikian, diantara variable laju inflasi dan PDRB maka PDRB mempunyai pengaruh dalam peningkatan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Dian (2016), Tahwin (2013) dan Nadya (2013).

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris mengenai tingkat efektivitas dan Pengaruh Laju inflasi serta PDRB terhadap pendapatan pajak daerah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 – 2019 adalah sebagai berikut: (1) Pajak Hotel 127% ; (2) Pajak Restoran 138% ; (3) Pajak Hiburan 128%; (4) Pajak Reklami 129%; (5) Pajak Penerangan jalan 121%; (6) Pajak bahan galian golongan C 153%; (7) Pajak Parkir 144%; (8) Pajak Air

- bawah tanah 124%; (9) Pajak Bumi dan Bangunan 117%. Koefisien efektivitas diatas 100% yang artinya sangat efektif.
2. Diantara variable laju inflasi dan PDRB, maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel PDRB. Semakin tinggi PDRB maka akan semakin tinggi penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1980. Ekonomi Moneter. Yogyakarta:BPFE.UGM
- BPS Kabupaten Sukoharjo. Beberapa Terbitan. Kabupaten Sukoharjo dalam Angka. Sukoharjo:BPS Kabupaten Sukoharjo
- Damodar, Gujarati.1995. Ekonometrika Dasar.Jakarta: Erlangga
- Devas, Nick et al.1989.Kuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI. Press
- Dian, Purnama Sari.2016”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah di Kabupaten Bengkulu”Jurnal Akuntansi vol.6 no.1 Pebruari 2016
- Fajarwati, Istriya Nikmah.2008”Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)”Skripsi S1.UNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Available
- K.J.Davey.1998.Pembiayaan Pemerintah Daerah.Jakarta:UI
- Kusuma, Hardiana.2007”Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka meningkatkan PAD di Kota Madiun”Skripsi S1.UNS
- Kristiana, Advina Helti.2010”Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)”Skripsi S1.UNS
- Mahmudi.2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogya: UPP STIM YKPN

- Nelsi Wisna.2007”Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah”.Jurnal Ilmiah Akuntansi vol 6 no.2 November 2007
- Nadya, Fazriana Haniz.2013”Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah Kota Tegal”Diponegoro Journal of Economics vol.3 no. 1 tahun 2013.
- Rira, Nuradhawati. 2019”Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”Jurnal Academi Praja vol 2 no.1 Pebruari 2019
- Saputro, DP.2018”Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah (Studi di Kabupaten Temanggung”Skripsi S1.UNDIP
- Sukirno, Sadono.2004. Pengantar Teori Makro. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tahwin, Muhammad. 2013.”Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah”Jurnal Buletin Studi Ekonomi vol.18 no.2 Agustus 2013.
- Thamrin Simanjuntak.2001.Analisis Potensi PAD, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.Yogya: UPP
- Mahardika, Putu.2003”Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Pemkab Sleman”.Lintasan Ekonomi.Vol 20 no.2 Juli 2003
- Munawir. 1997. Perpajakan. Yogya: Liberty
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang, Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Daerah